

**STUDI ETNOGRAFI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT PADA AREAL  
HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) TANDUNG BILLA KELURAHAN  
BATTANG KECAMATAN WARU BARAT KOTA PALOPO**



**MUHAMMAD FATTAH AL GHANIY TAHIR**  
**M011201043**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN**  
**FAKULTAS KEHUTANAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**STUDI ETNOGRAFI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT PADA  
AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) TANDUNG BILLA  
KELURAHAN BATTANG KECAMATAN WARU BARAT KOTA PALOPO**

**MUHAMMAD FATTAH AL GHANIY TAHIR  
M011 20 1043**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**STUDI ETNOGRAFI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT PADA  
AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) TANDUNG BILLA  
KELURAHAN BATTANG KECAMATAN WARU BARAT KOTA PALOPO**

MUHAMMAD FATTAH AL GHANIY TAHIR

M011 20 1043

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kehutanan

pada

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN**

**FAKULTAS KEHUTANAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**STUDI ETNOGRAFI KETERGANTUNGAN MASYARAKAT PADA  
AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) TANDUNG BILLA  
KELURAHAN BATTANG KECAMATAN WARU BARAT KOTA PALOPO  
SKRIPSI**

**MUHAMMAD FATTAH AL GHANIY TAHIR**  
**M011201043**

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
penyelesaian Sarjana S-1 Kehutanan  
pada Agustus 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin  
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Ir. Yusran, S.Hut. M.Si., IPU

NIP 196912061996031004

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si

NIP 197908312008121002

Mengetahui

Ketua Program Studi Kehutanan



Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P

NIP 19680410199512 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Studi Etnografi Ketergantungan Masyarakat Pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tandung Billa Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama dan pendamping (Bapak Prof. Dr. Ir. Yusran S.Hut., M.Si., IPU sebagai pembimbing utama dan Bapak Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si sebagai pembimbing pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 9 Agustus 2024



MUHAMMAD FATTAH AL GHANIY TAHIR  
M011201043

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Etnografi Ketergantungan Masyarakat Pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tandung Billa Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo”, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada ibunda tercinta **Rusnawati** dan ayahanda terkasih **Muh. Tahir Nessa** dua orang yang sangat berjasa, telah memberikan motivasi, perhatian, do’a dan dukungan penuh kepada penulis. Kepada saudara-saudaraku **Muhammad Farhan Tahir** dan **Faza Agniya Nafilah Tahir** serta segenap Keluarga Besar yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa serta bantuan selama penyusunan skripsi penulis. Terima kasih atas doa, motivasi dan bentuk bantuan yang telah diberikan, sehingga penulis merasa termotivasi di segala pilihan dan keputusan yang diambil. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kenikmatan yang cukup. Dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan rasa terima kasih khususnya kepada:

1. **Bapak Prof. Yusran, S.Hut., M.Si., IPU** serta **Bapak Prof. Dr. forest. Muhammad Alif KS, S.Hut., M.Si.**, selaku pembimbing utama dan pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Emban Ibnurusyid Mas’ud, S.Hut., M.P** dan **Ibu Andi Vika Faradiba Muin, S.Hut., M.Hut**, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Kehutanan Ibu **Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P.**, Dosen Pembimbing Akademik, seluruh **Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin** yang telah membantu dan memudahkan penulis selama menuntut ilmu serta dalam pengurusan administrasi penulis selama menempuh pendidikan.
4. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa Bapak **Muzakkir** dan Bapak **Ali Rahim** yang mendampingi selama penelitian serta anggota dan masyarakat Battang yang turut andil dalam penelitian.
5. Teman seperjuangan penelitian penulis **Britny** dan **Oktavia** yang telah membantu penulis dalam pengambilan data penelitian.
6. Terkhusus kepada **Yolanda Eka Puteri** terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama penyusunan skripsi.
7. Teman-teman Daya Rawan Banjir, **Rizwandi, S.Hut, Kautsar Suwardi, S.Hut, Haspian, S.Hut, Ainul Yaqin, S.Hut, Hafid Jarwo, Muh. Idris, Akbar Syawal** yang telah memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi.
8. Teman-Teman Cambridge Holic, **Fathur, Reza, Rio, Silmi, Uhud, Tami** yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sobat seperjuangan penulis di **UKM Pencak Silat Unhas** yang menemani selama proses perkuliahan.
10. Teman-teman **Spyolic20** dan **Sispala 25** yang memberikan dukungan dan semangat pada saat penelitian.

11. Teman-teman **IMPERIUM 20** dan **laboratorium Kebijakan** , telah membantu penulis pada saat penelitian serta memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat atas keikhlasan dan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya pengembangan untuk ilmu kehutanan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan didalam penelitian skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan dimasa yang akan datang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas perhatian dan pemberian semangat selama proses penyelesaian skripsi.

Penulis,

Muhammad Fattah Al Ghaniy Tahir

## ABSTRAK

Muhammad Fattah Al Ghaniy Tahir (M011201043). **Studi Etnografi Ketergantungan Masyarakat Pada Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tandung Billa Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo** (dibimbing oleh Yusran dan Muhammad Alif KS).

Sejak dahulu Tana Luwu dikenal dengan julukan "*Wanua Mappatuonaewai Alena*" yang bermakna bahwa Tana Luwu ini merupakan bumi yang dapat memberi kehidupan dan sumber penghidupan bagi masyarakatnya. Ba'tan ialah sebutan bagi serumpun kesatuan adat untuk orang-orang yang mendiami bagian kawasan hutan Nanggala III yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Interaksi sosial masyarakat sekitar hutan bisa dilihat dari ketergantungan masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan dasar seperti air, sumber energi dari kayu bakar dan makanan yang hutan hasilkan, bahan bangunan dan sumberdaya lainnya. Program perhutanan sosial dengan skema HKm dianggap sebagai langkah utama dalam rangka melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terutama terkait dengan mata pencaharian masyarakat yang terdampak. Diperlukan suatu rumusan strategi pengelolaan yang dapat memadukan aspek yakni ekologi, sosial, dan ekonomi, serta kelembagaan. Eksistensi HKm diharapkan menjadi solusi yang komprehensif untuk keberlanjutan hutan lindung Battang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perkembangan historis skema penguasaan dan penggunaan lahan, mendeskripsikan praktik sehari-hari petani dan kepercayaan lokal serta interpretasinya secara makna sosial. Serta mengidentifikasi ketergantungan masyarakat khususnya anggota Gapoktanhut pada areal HKm Tandung Billa melalui aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekologi. Penelitian ini menggunakan teknik etnografi dengan pengamatan secara langsung dan melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan subjek penelitian. Informan sebanyak 20 orang, antara lain berasal dari petani, to matua Ba'tan, dan ketua kelompok Gapoktanhut Tandung Billa. Terdapat 4 status kawasan hutan Battang yakni Hutan Negara, Hak Guna Usaha PT. HBI BM, Hutan Penyangga, dan HKm Tandung Billa. Praktik sehari-hari petani Gapoktanhut antara lain pekerjaan rumah tangga, pengelolaan lahan, pemanfaatan HHBK, agenda Gapoktanhut. Praktik tersebut berpegang pada kepercayaan lokal masyarakat adat Battang. Praktik sehari-hari diinterpretasikan melalui makna sosial. Ketergantungan masyarakat petani Gapoktanhut diukur melalui aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekologi

Kata kunci: Ba'tan, Hutan Kemasyarakatan, Ketergantungan, Etnografi, Gapoktanhut

## ABSTACT

Muhammad Fattah Al Ghaniy Tahir (M011201043). **Ethnographic Study of Community Dependence on Community Forest Area (HKm) Tandung Billa Battang Village, Wara Barat Subdistrict, Palopo City** (supervised by Yusran and Muhammad Alif KS).

Tana Luwu has long been known by the nickname 'Wanua Mappatuonaewai Alena' which means that Tana Luwu is an earth that can provide life and livelihood for its people. Ba'tan is the name for a group of customary units for people who inhabit part of the Nanggala III forest area which is now included in the West Wara District, Palopo City. The social interaction of communities around the forest can be seen in their dependence on basic life sources such as water, energy sources from firewood and food produced by the forest, building materials and other resources. The social forestry programme with the HKm scheme is considered a major step in order to preserve the environment and improve the welfare of local communities. Especially related to the livelihoods of affected communities. A management strategy formulation is needed that can combine aspects of ecology, social, and economy, as well as institutions. The existence of HKm is expected to be a comprehensive solution for the sustainability of Battang protected forest. The purpose of this study is to provide a comprehensive understanding of the historical development of land tenure and use schemes, describe the daily practices of farmers and local beliefs and their interpretation in social meaning. As well as identifying community dependence, especially members of Gapoktanhut on the Tandung Billa HKm area through economic aspects, social aspects, cultural aspects, and ecological aspects. This research uses ethnographic techniques by direct observation and looking closely at the activities carried out by the research subjects. There were 20 informants, including farmers, to matua Ba'tan, and the head of the Gapoktanhut Tandung Billa group. There are 4 statuses of the Battang forest area, namely State Forest, PT HBI BM Cultivation Rights, Buffer Forest, and Tandung Billa HKm. The daily practices of Gapoktanhut farmers include household chores, land management, NTFP utilisation, Gapoktanhut agenda. These practices adhere to the local beliefs of the Battang indigenous people. Daily practices are interpreted through social meaning. The dependence of the Gapoktanhut farming community is measured through economic aspects, social aspects, cultural aspects, and ecological aspects.

Keywords: Ba'tan, Community Forest, Dependency, Ethnography, Gapoktanhut

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Teori .....	2
BAB II METODE PENELITIAN .....	7
2.1 Waktu dan Tempat .....	7
2.2 Alat dan Bahan .....	7
2.3 Sumber Data .....	7
2.4 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	7
2.5 Teknik Pengumpulan Data .....	7
2.6 Analisis Data .....	8
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	9
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	9

3.2 Keadaan Sosial Ekonomi .....	10
3.3 Identifikasi Karakteristik Informan .....	10
3.4 Rekam Jejak Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan Battang .....	13
3.5 Tingkat Ketergantungan Masyarakat .....	20
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>22</b>
4.1 Kesimpulan .....	22
4.2 Saran .....	23
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>27</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>No. Urut</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Penduduk Kelurahan Battang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	10
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	10
3. Jumlah dan Persentase Berdasarkan Tingkat Umur .....	11
4. Jumlah dan Persentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	11
5. Jumlah dan Persentase Berdasarkan Tanggungan Keluarga .....	12
6. Jumlah dan Persentase Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....	12

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Urut</b>	<b>Halaman</b>
1. Sketsa Pengkategorian Data .....	8
2. Peta Lokasi Penelitian .....	9
3. Status Kawasan Hutan Battang .....	17
4. Bagan Kompleksitas Ketergantungan Masyarakat .....	21

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Urut</b>	<b>Halaman</b>
1. Pedoman Wawancara .....	28
2. Identitas Anggota Gapoktanhut Tandung Billa .....	31
3. Pembuatan Ajir untuk Kegiatan Penanaman Bersama .....	32
4. Kegiatan FGD bersama petani anggota Gapoktanhut .....	33
5. Kegiatan pemeliharaan bibit di persemaian .....	34
6. Kegiatan wawancara .....	35
7. Mengunjungi areal camping ground .....	36
8. Memanen buah (durian dan rambutan) .....	37
9. Surat keputusan izin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm) Tandung Billa .....	38
10. Catatan Lapangan .....	46

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara legal formal masyarakat hukum adat yang mengelola kawasan hutan negara secara sah di areal Kelurahan Battang tidak ada yang mendapat pengakuan dari pemerintah daerah, sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Namun demikian, secara umum masyarakat Tana Luwu hidup dalam bingkai adat istiadat yang masih dipegang sebagai Wija To Luwu.

Sejak dahulu Tana Luwu dikenal dengan julukan "*Wanua Mappatuonaewai Alena*" yang bermakna bahwa Tana Luwu ini merupakan bumi yang dapat memberi kehidupan dan sumber penghidupan bagi masyarakatnya. Bentang alam yang luas dengan segala potensi yang ada didalamnya baik hayati maupun nonhayati dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang ada di seluruh Tana Luwu.

Keberadaan potensi sumber daya hutan yang ada harus mampu menjadi bagian penting guna mempertahankan eksistensi Tana Luwu sebagai *Wanua Mappatuonaewai Alena*. Hutan yang memiliki fungsi sebagai penyangga sistem kehidupan manusia harus mampu memainkan perannya dalam pengendalian longsor, banjir dan kekeringan yang sering terjadi. Sebagai kawasan penyangga DAS yang aliran airnya menunjang irigasi-irigasi teknis di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Ba'tan ialah sebutan bagi serumpun kesatuan adat untuk orang-orang yang mendiami bagian kawasan hutan Nanggala III yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Secara administratif mereka kini tersebar di Kelurahan Battang, Battang Barat, Padang Lampe, dan Kambo. Secara adat Ba'tan dikenal sebagai masyarakat *Katomakakaan* yang dikepalai oleh seorang tokoh adat bergelar To Makaka. Setiap wilayah diwakili seorang To Matoa. Tetua-tetua itulah yang menjadi sentral tata kelola peri kehidupan orang-orang Ba'tan. Tak terkecuali terkait bagaimana cara mengelolah hutan. Pepatah diatas mengisyaratkan betapa sakral makna hutan bagi orang-orang Ba'tan. Pun betapa pentingnya hutan bagi kehidupan sekaligus penghidupan mereka.

Setidaknya ada tiga dusun yang didiami oleh masyarakat Ba'tan pada jaman dulu. Dusun-dusun itu adalah Mappanga, Betteng, juga To' Jambu. Tiga dusun tersebut mencakup dua puluh kampung. Yakni Kampung Salu Tallu, Pollo Tempe, Durian Rante, Pokkandoka, Tirowali, Bamba, Pa'nyarangan, Nahna, Tombarani, Parondonan, Batu Tongkon, Billa, Barana, Tambun Tanah, Tombang, Panggaru, Rano, Buntu Nase, Kaliwakan, dan To Wurru.

Interaksi sosial masyarakat sekitar hutan bisa dilihat dari ketergantungan masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupan dasar seperti air, sumber energi dari kayu bakar dan makanan yang hutan hasilkan, bahan bangunan dan sumberdaya lainnya (Fahrurrahman, 2020).

Masyarakat hutan adalah masyarakat yang tinggal di dekat hutan yang penghidupan serta lingkungannya sangat bergantung pada hutan. Salah satu masyarakat yang memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan kemasyarakatan adalah masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Berdasarkan Basis Data Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), pemerintah telah menerbitkan izin pengelolaan kepada masyarakat, khususnya Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada masyarakat khususnya Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) dengan nomor surat keputusan yaitu SK.2628/Menlhk-Pskl/Pkps/Psl.0/5/2017 (Witno, 2020).

Keberadaan HKm diklaim masyarakat sebagai tanah adat yang memicu konflik tenurial. Hanya saja aspirasi dan fakta pemberian ijin akses kelola HKm juga mengalami dengan aspirasi dan upaya lain oleh kelompok masyarakat lainnya dalam mengupayakan akses bentuk perhutanan sosial lainnya, yaitu hutan adat di wilayah yang sama atau pada wilayah yang bersinggungan. Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan dan pertentangan klaim kekuasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemamfaatan kawasan hutan. Konflik juga dapat ditimbulkan oleh adanya pemberian pemamfaatan hutan kepada satu pihak dan terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda terhadap kawasan tersebut.

Bagi Masyarakat Adat Battang hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Pengelolaan hutan adat Battang dilakukan oleh pemangku adat. Hutan adat Battang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua yaitu hutan biasa atau panggale' dan hutan adat tomatua Hutan biasa boleh dikelola dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik kayu maupun bukan kayu. Sementara atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diapa-apakan karena mengandung nilai sejarah orang-orang yang dimuliakan oleh masyarakat adat Battang, seperti Sawerigading dan Batara Guru Masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi, kedalaman pengetahuan kehidupan yang mengagumkan serta sistim sosial-ekonomi yang tangguh. Namun demikian, dalam kenyataannya terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat. Masyarakat hutan adat umumnya terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh makhluk (Mulyadi,2013).

Program perhutanan sosial dengan skema HKm dianggap sebagai langkah utama dalam rangka melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Terutama terkait dengan mata pencaharian masyarakat yang terdampak. Diperlukan suatu rumusan strategi pengelolaan yang dapat memadukan aspek yakni ekologi, sosial, dan ekonomi, serta kelembagaan. Eksistensi HKm diharapkan menjadi solusi yang komprehensif untuk keberlanjutan hutan lindung Battang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perkembangan historis skema penguasaan dan penggunaan lahan, mendeskripsikan praktik sehari-hari petani dan kepercayaan lokal serta interpretasinya secara makna sosial. Serta mengidentifikasi ketergantungan masyarakat khususnya anggota Gapoktanhut pada areal HKm Tandung Billa melalui aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek ekologi. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan bahan rujukan mengenai data tingkat ketergantungan masyarakat terhadap areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tandung Billa.

## 1.2 Teori

Keberadaan hutan terhadap semua aspek kehidupan sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan merupakan media timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lain dengan berbagai faktor alam seperti proses ekologi dan merupakan hubungan yang integral dari siklus penyokong kehidupan (Reksohadiprojo, 2000). Tingkat Pendidikan yang rendah oleh masyarakat lokal sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar yang konsumtif (Ngakan dkk, 2006). Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi memanfaatkan sumberdaya hutan secara arif dan bijaksana, tetapi kecenderungan melakukan perambahan dan eksploitasi yang tidak terkontrol. Kondisi ini hampir terjadi di semua kawasan hutan di Indonesia.

Interaksi antara masyarakat sekitar hutan dengan memanfaatkan sumberdaya hasil hutan telah mendapat perhatian besar dari pada akademisi serta pejabat pembuat kebijakan karena kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan

berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan secara berkelanjutan berdampak pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan. Pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi berbagai kehidupan, berupa ketergantungan ekonomi seperti areal perladangan dan perkebunan, bahan bangunan, dan fungsi lain yang berhubungan dengan kelembangaan sosial tradisional di masyarakat. Simon (2000) menyatakan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat adalah komponen yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan arah pengelolaan hutan.

Selanjutnya Subantini (2002) menerangkan karakteristik sosial ekonomi budaya sangat berpengaruh dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan perlu diketahui untuk mengukur pengaruh keberadaan masyarakat terhadap hutannya. Dengan mengetahui keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat hutan adalah sebuah kajian yang perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai hubungan dan pengaruh adanya hutan serta fungsinya terhadap kehidupan masyarakat sekitar hutan termasuk membuat desain atau penilaian dan catatan kegiatan pengelolaan hutan.

Pengambilan Keputusan dalam pengelolaan hutan atas dasar kesepakatan dan persetujuan petani itu sendiri, dimana petani mengatur, mengorganisir pemanfaatan sumberdaya agar mampu memberikan yang maksimal dan sesuai harapan. Selajutnya mengajukan permohonan ke pemerintah sesuai dengan alur prosedural yang ada.

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan sudah lama terjadi. Menurut sukardi (2008) pada satu bagian, ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan hutan dapat lebih antusias bagi masyarakat untuk memeliharanya, didasarkan dari berbagai kearifan lokal yang dipercaya secara turun temurun. Tetapi di sisi lain, adanya korelasi dengan kebutuhan yang meningkat serta adanya faktor-faktor lain yang justru akan menjadi pemicu perambahan hutan. Peraturan perundangan yang berlaku memberikan akses kepada masyarakat untuk turut andil dalam pengelolaan hutan (termasuk memanfaatkan hasil hutan, namun tetap dalam ketentuan yang berlaku. Mangadar (2000) mengatakan bahwa interaksi masyarakat dengan kawasan hutan bisa diarahkan pada suatu tingkat integrasi dimana kebutuhan masyarakat terhadap sumberdaya bisa terpenuhi tanpa mengganggu dan merusak potensi kawasan.

Masyarakat sekitar hutan memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber kehidupan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa ekosistem. Bentuk-bentuk ketergantungan masyarakat terhadap hasil hutan yaitu pemanfaatan dalam bentuk kayu bakar, bumbu, tanaman obat, gula aren, madu, dan lain-lain. Sedang aspek ekonomi memberikan nilai tambah secara finansial, aspek sosial memberikan nilai bermasyarakat, aspek budaya memberikan nilai Kerjasama, dan aspek ekologi sebagai lingkungan kehidupan yang nyaman.

Perhutanan Sosial juga memberikan legitimasi hukum kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara (Hadi, 2017). Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi kearifan lokal dalam melestarikan sumber daya hutan. Dalam kerangka sasaran pembangunan nasional, PS mendukung peningkatan mata pencaharian, penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan dengan orientasi pro-miskin, pro-pekerjaan, pro-pertumbuhan, dan pro-lingkungan.

Tujuan dari program ini untuk memberdayakan masyarakat desa yang bergantung pada kayu bakar dan hasil hutan lainnya agar dapat menghasilkan sumber pendapatan sendiri tanpa merusak sumber daya hutan yang ada. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, diharapkan fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan konservasi dapat terjaga dengan lestari. Model pengelolaan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat inilah yang kemudian menjadi dasar dari Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS) yang kita kenal saat ini. Program Perhutanan Sosial tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan, tetapi juga untuk membantu

mengurangi dan mengatasi kemiskinan bagi masyarakat di dalam dan sekitar hutan (Nurbaya, 2018).

Firdaus (2018), menjelaskan bahwa Perhutanan Sosial menyediakan beragam skema yang memungkinkan masyarakat memperoleh hak kelola atau izin pemanfaatan kawasan hutan. Perhutanan sosial memiliki 5 skema dalam penerapannya yang terdiri dari hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Keberagaman skema ini terutama didasarkan pada pihak yang mengajukan permohonan perhutanan sosial dan fungsi khusus yang ditetapkan untuk kawasan hutan tersebut. Setiap skema memiliki masing-masing perihal siapa yang dapat mengajukan permohonan perhutanan sosial dan fungsi hutan yang diatur untuk kawasan hutan yang diajukan. Dengan kata lain, perbedaan ini menciptakan variasi dalam jenis izin yang diberikan kepada masyarakat.

Hubungan masyarakat lokal dengan hutan sudah terjalin sejak lama, keberadaan hutan telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Mereka bergantung pada sumber daya hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun non-kayu yang memberikan nilai tambah bagi penghidupan mereka. Sumber daya hutan adalah hasil alam yang diambil dari kawasan hutan baik berupa hasil hutan kayu maupun bukan kayu, serta meliputi tumbuhan dan satwa yang ada di dalam hutan. Beberapa dari hasil alam ini berasal dari lingkungan alam, sementara yang lain berasal dari lingkungan yang dibudidayakan manusia (Haryani dan Rijanta, 2019).

Secara umum, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sangat bergantung pada hasil hutan (Haryani dan Rijanta, 2019). Ketergantungan masyarakat terhadap hutan dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan terhadap lahan dan bentuk pemanfaatan hutan, seperti pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemanfaatan jasa lingkungan (Widyaningsih dkk, 2019).

Penting untuk dipahami bahwa hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya membentuk hubungan saling membutuhkan, dan manusia memerlukan lingkungan yang sehat, lestari, indah, dan nyaman untuk mempertahankan kehidupan yang berkualitas dan produktif. Namun kelestarian lingkungan juga sangat bergantung pada kepentingan manusia dalam menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup, termasuk hutan secara berkelanjutan. Salah satu program pemerintah dalam pengelolaan hutan secara legal adalah program kehutanan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi hutan dan memberikan manfaat kepada masyarakat lokal (Anno dkk, 2022).

Khusus pada kawasan hutan Nanggala III yang berada di kawasan administrasi Kelurahan Battang Kota Palopo tidak mudah dalam proses permohonan ke pemerintah dalam permohonan rekomendasi penerbitan IUPHKm karena pada hakikatnya masyarakat Kelurahan Battang adalah serumpun dari masyarakat adat Ba'tan yang juga menginginkan skema Perhutanan Sosial yang lain yaitu Hutan Adat, hal tersebut menimbulkan konflik tenurial dilingkup masyarakat adat Ba'tan. Untuk itu, negara dituntut memainkan perannya sebagai pengatur kebijakan dan yang berwenang dalam pemberian izin. Seringkali masalah-masalah penguasaan hutan timbul akibat klaim penguasaan sepihak oleh kelompok masyarakat atau individu dengan anggapan tanah dalam kawasan hutan sebagai tanah tak bertuan yang bisa digarap, dikelola bahkan diperjualbelikan (Susilowati, 2015). Persoalan penguasaan lahan dalam areal hutan dengan semua akibatnya umumnya dianalogikan sebagai konflik tenurial. Dalam beberapa referensi sumber konflik menurut Pruitt dan Rubin (2009) dalam (Munawar, 2018) didefinisikan sebagai pemahaman mengenai perbedaan kepentingan (*percieved divergence of interest*).

Berdasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.84 Tahun 2015 Tentang Penangan Konflik Tenurial di dalam Kawasan Hutan diterangkan bahwa konflik tenurial adalah segala macam perselisihan klaim penguasaan, pengelolaan,

penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Dalam perselisihan sumberdaya hutan terdapat orientasi dan kepentingan yang berbeda antara dua pihak atau lebih yang terlibat. Pada satu hal, satu pihak ingin mempertahankan hak dan kewajiban disamping pihak lain yang ingin menghendaki hak dan kewajibannya pada penguasaan lahan untuk dapat diperolehnya (Nur, 2014).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program perhutanan sosial di hutan negara yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola hutan yang dikelola secara lestari dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan (Ilfa dkk, 2021). Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu pilihan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menurunkan laju deforestasi di Indonesia melalui partisipasi masyarakat dan bertujuan untuk memperkuat hak pengelolaan dan mengurangi konflik kehutanan (Sylviani dkk, 2019).

Masyarakat hutan adalah masyarakat yang tinggal di dekat hutan yang penghidupan serta lingkungannya sangat bergantung pada hutan. Salah satu masyarakat yang memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan kemasyarakatan adalah masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Berdasarkan Basis Data Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020), pemerintah telah menerbitkan izin pengelolaan kepada masyarakat, khususnya Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada masyarakat khususnya Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) dengan nomor surat keputusan yaitu SK.2628/Menlhk-Pskl/Pkps/Psl.0/5/2017 (Witno, 2020).

Program hutan kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan, sekaligus menjamin fungsi hutan dan pelestarian lingkungan (Huzaini dkk, 2023). Hutan kemasyarakatan adalah program pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan bersama suatu kawasan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan merasakan dampak yang signifikan. Masyarakat memiliki akses terhadap produk non-kayu dari hutan. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomiannya (Asgar, 2019).

Pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan yang bertujuan untuk integrasi masyarakat dilakukan melalui penguatan organisasi kemasyarakatan. Pengorganisasian kelompok tani hutan dapat menjadi dasar pelaksanaan program apapun di dalam kelompok. Partisipasi aktif masyarakat pada fasilitas pengelolaan kawasan hutan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Pengelolaan hutan kemasyarakatan berjalan baik melalui kelompok petani hutan. Kelompok tani merupakan lembaga setingkat Gapoktan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan usaha bersama dan menjadi tempat para anggota berinteraksi dan berkoordinasi untuk segera mencapai tujuan bersama (Asgar, 2019).

Pemanfaatan hasil hutan di pedesaan mempunyai dua aspek sosial yang mempengaruhi keberadaan kawasan hutan. Aspek pertama, mayoritas wilayah pedesaan yang mengkonsumsi hasil hutan berasal dari kawasan hutan. Hal ini menjadikannya sebagai titik fokus interaksi yang erat antara masyarakat dan kawasan hutan. Hubungan masyarakat dan hutan tidak hanya terletak pada pemanfaatan hasil hutan saja, namun juga terdapat interaksi simbolik yang erat dengan budaya dan tradisi (Sulham dkk, 2021).

Hutan merupakan sumber daya yang menempati tempat yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pengelolaan hutan secara lestari memerlukan tenaga kerja yang berkualitas, terampil secara ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan yang baik. Pemanfaatan sumber daya hutan dipengaruhi

oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan masyarakat dan masih sangat tingginya angka kemiskinan masyarakat sekitar. Upaya mewujudkan konsep pengelolaan hutan lestari memerlukan keterlibatan masyarakat hutan sebagai pemangku kepentingan utama yang sering berinteraksi dengan hutan (Witno dkk, 2020).

## BAB II METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 28 Februari hingga 8 Maret tahun 2023 di Hkm Tandung Billa, Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

### 2.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Handphone, yang digunakan untuk merekam kegiatan wawancara yang dilakukan terhadap responden
- b. Kamera, sebagai alat dokumentasi lapangan
- c. Alat tulis menulis, yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara terhadap responden
- d. Pedoman wawancara, yang digunakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan data melalui proses wawancara terhadap responden

### 3.3 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Pramiyati, 2017).

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan masyarakat sebagai responden
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya

### 3.4 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah secara kualitatif. Sesuai asumsi ontologis pendekatan kualitatif bahwa realitas bersifat subjektif dan *multiple* oleh para partisipan, serta asumsi epistemologis tentang interaksi antara peneliti dan tineliti (Creswell 1994). Dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Marshall, 1995).

Penelitian ini juga menggunakan etnografi untuk mengetahui secara mendalam mengenai praktik sehari-hari dan makna dari praktik itu bagi masyarakat di lokasi penelitian dengan cara dengan mengikuti kehidupan sehari-hari petani. Syarat utama dalam melakukan studi etnografi, peneliti harus hidup diantara objek dan subjek yang ditelitinya untuk jangka waktu yang relatif cukup bagi peneliti untuk dapat hidup terintegrasi dengan masyarakat yang ditelitinya.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi etnografis selama 10 hari dengan cara:

1. Pengamatan secara langsung dan melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan subjek penelitian. Data yang dihasilkan dari pengamatan berupa catatan lapangan (*field notes*). Informan sebanyak 20 orang, antara lain berasal dari petani, to matua Ba'tan, dan ketua kelompok Gapoktanhut Tandung Billa
2. Wawancara, teknik wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian. Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara (semi-terstruktur) bertujuan untuk mengembangkan pertanyaan secara bebas dan masih terkait dengan topik.

### 3.6 Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Dengan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data dengan melihat kejadian berdasarkan observasi dan wawancara. Data yang didapatkan kemudian diinterpretasikan dan dijelaskan secara mendalam tentang praktik sehari-hari anggota Gapoktanhut Tandung Billa serta makna sosial yang kaitannya dengan praktik sehari-hari.

Kedua, pengkategorian data kualitatif menggunakan bagan tema, konsep, dan kategori membantu peneliti dalam mengorganisasi dan memahami kompleksitas data yang diperoleh dari penelitian. Data kualitatif menggunakan bagan tema, konsep, dan kategori untuk memahami dan mengorganisir data secara sistematis. Teori ini mengakui kompleksitas data kualitatif dan mencoba untuk mengekstrak makna yang terkandung di dalamnya. Bagan tema, konsep, dan kategori adalah alat yang digunakan dalam proses analisis, di mana tema adalah pola atau topik utama yang muncul dari data, konsep adalah ide-ide yang lebih abstrak yang mencakup tema-tema tersebut, dan kategori adalah kumpulan tema atau kode yang terkait secara tematik. Dengan menggunakan bagan ini, peneliti dapat mengorganisir data, mengidentifikasi hubungan antara konsep-konsep, dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Ini membantu dalam pembentukan narasi yang kohesif dan interpretasi yang mendalam tentang temuan penelitian.

**Gambar 1.** Sketsa Pengkategorian Data

